

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN  
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA  
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04012500182483219			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI, CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750 NPWP : 0715420659018000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : HIKARI INDO SARANA Alamat : JL KHM MANSYUR NO.141, RT 000, RW 000, DURI UTARA, TAMBORA, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11270 #0020375895033000000000 NPWP : 0020375895033000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: pajak.hikari@yahoo.co.id			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	853800	Wall-mounted-Power track 1m-Black Rp 545.983,78 x 6,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	3.275.902,68
2	732600	Bingkai Saklar 4- Warna Putih(Matt Champagn e) Rp 42.324,32 x 3,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	126.972,96
3	853600	Stop Kontak Saklar Internasi onal 10A Rp 32.918,92 x 20,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	658.378,40
4	853600	Outlet TV & Data Rp 115.216,22 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.152.162,20
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			5.213.416,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			4.778.965,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			573.476,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 24 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik  
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250429-0039)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.